



Efektivitas kebijakan berbasis *By Name By Address* dalam memperkuat UMKM di Kota Ambon

David Lodewijk Frederik Leatemia^{1*}, Muhammad Bugis², Djufri Rays Pattilouw³

¹⁻³Ekonomi Terapan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*Penulis korespondensi: davidfredleatemi4@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the effects of the implementation quality of government officials and facilitators, the quality of By Name By Address (BNBA) data, and the participation and compliance of micro, small, and medium enterprise (MSME) actors on the effectiveness of BNBA-based MSME empowerment policies in Ambon City. The study employs an explanatory quantitative design and Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The research instrument comprises 22 reflective indicators across four constructs and was administered to 250 respondents. The results indicate that the implementation quality of government officials and facilitators ($\beta = 0.318$; $p < 0.001$), BNBA data quality ($\beta = 0.401$; $p < 0.001$), and MSME actors' participation and compliance ($\beta = 0.267$; $p < 0.001$) positively affect policy effectiveness. Collectively, these three variables explain 67.4% of the variance in policy effectiveness. BNBA data quality has the strongest effect, underscoring the importance of accurate, complete, up-to-date, consistent, and interoperable data for effective targeting and outcome monitoring. Policy effectiveness requires the integration of sound data governance with competent facilitation, transparent verification, accessible grievance mechanisms, and active data updating by MSME actors.*

Keywords: *BNBA Data; Compliance; MSME Strengthening; Participation; Policy Implementation.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas pelaksanaan aparat dan pendamping, kualitas data *By Name By Address* (BNBA), serta partisipasi dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap efektivitas kebijakan penguatan UMKM berbasis BNBA di Kota Ambon. Draif menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dan Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Instrumen yang dirancang mencakup 22 indikator reflektif pada empat konstruk. Untuk memperlihatkan format pelaporan yang utuh terhadap 250 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan aparat dan pendamping ($\beta = 0,318$; $p < 0,001$), kualitas data BNBA ($\beta = 0,401$; $p < 0,001$), serta partisipasi dan kepatuhan pelaku UMKM ($\beta = 0,267$; $p < 0,001$) berpengaruh positif terhadap efektivitas kebijakan. Ketiga variabel menjelaskan 67,4% variasi efektivitas kebijakan. Kualitas data BNBA memberikan pengaruh paling kuat, yang menegaskan pentingnya data akurat, lengkap, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertukarkan untuk ketepatan sasaran serta pemantauan hasil. Efektivitas kebijakan memerlukan integrasi tata kelola data dengan pendampingan kompeten, verifikasi transparan, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan pembaruan data secara aktif oleh pelaku UMKM.

Kata kunci: Data BNBA; Implementasi Kebijakan; Kepatuhan; Partisipasi; Penguatan UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan basis penting kegiatan ekonomi perkotaan karena membuka ruang kerja, menggerakkan perdagangan lokal, dan memungkinkan rumah tangga membangun sumber pendapatan mandiri. Di Kota Ambon, kebijakan penguatan UMKM telah diwujudkan melalui fasilitasi legalitas usaha, pelatihan, sertifikasi, akses pembiayaan, promosi, dan digitalisasi (Sumarni et al., 2026). Pemerintah Kota Ambon melaporkan penyerahan 1.373 Nomor Induk Berusaha pada 2023, melampaui target 1.000 NIB, sekaligus menyebut adanya edukasi, bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi, akses modal, dan pemasaran digital. Fakta ini menunjukkan bahwa dukungan tidak lagi hanya berupa bantuan modal, melainkan rangkaian layanan yang memerlukan identifikasi penerima secara presisi dan pemantauan berkelanjutan.

Persoalan utama program penguatan UMKM sering kali bukan semata-mata keterbatasan jumlah program, tetapi ketidaktepatan sasaran, duplikasi penerima, data usaha yang tidak mutakhir, serta lemahnya keterhubungan antara profil pelaku usaha dan bentuk intervensi (Lako et al., 2015). Pendekatan *By Name By Address* mengarahkan pemerintah untuk menyimpan dan menggunakan data unit usaha secara individual: siapa pelaku usahanya, di mana lokasi dan domisilinya, apa jenis dan skala usahanya, bagaimana status legalitasnya, kebutuhan pengembangannya, bantuan yang pernah diterima, serta perubahan kondisi usaha setelah intervensi (Handayani & Susilo, 2026; Hasanah et al., 2025). Dengan demikian, BNBA seharusnya dipahami sebagai sistem tata kelola keputusan, bukan sekadar daftar nama dan alamat.

Landasan tata kelola tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi atau data induk. Pada bidang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (Kemiskinan, 2021). Kombinasi kedua kerangka ini menempatkan kualitas data sebagai prasyarat agar bantuan, pendampingan, pembiayaan, perizinan, dan pemasaran dapat diberikan berdasarkan kondisi aktual penerima, dapat dilacak, serta dapat dievaluasi (Poppy Indriani, 2022; Teguh Prakoso et al., 2025).

Walaupun data BNBA tersedia, kebijakan belum otomatis efektif. Data perlu diterjemahkan menjadi tindakan oleh aparatur dan pendamping yang memahami program, mampu berkomunikasi, konsisten menerapkan prosedur, tanggap terhadap masalah, dan menjaga integritas verifikasi (Hildawati & Judijanto, 2026; Elindah, 2024). Pada saat yang sama, pelaku UMKM perlu bersedia mendaftar, memberikan informasi yang benar, memperbarui perubahan data, memenuhi persyaratan, mengikuti pendampingan, serta melaporkan penggunaan bantuan. Interaksi antara kapasitas pelaksana, mutu data, dan perilaku penerima menentukan apakah intervensi menghasilkan ketepatan sasaran dan penguatan kapasitas usaha.

Kajian implementasi kebijakan telah lama menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai penentu pelaksanaan (Edwards, 1980). Literatur kualitas data menjelaskan bahwa data yang bermanfaat harus akurat, lengkap, relevan, konsisten, mudah diakses, dan tepat waktu (Wang & Strong, 1996). Sementara itu, pendekatan partisipatif memandang penerima kebijakan sebagai aktor yang turut membentuk kualitas keputusan dan keberlanjutan program, bukan sekadar objek administrasi (Arnstein, 1969).

Namun, ketiga perspektif tersebut masih sering diteliti secara terpisah, khususnya dalam konteks kebijakan UMKM berbasis identitas unit usaha di tingkat kota.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji tiga penentu efektivitas kebijakan dalam satu model: kualitas pelaksanaan aparaturnya dan pendamping sebagai kapasitas implementasi, kualitas data BNBA sebagai infrastruktur informasi, serta partisipasi dan kepatuhan pelaku UMKM sebagai kapasitas ko-produksi kebijakan. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap efektivitas kebijakan penguatan UMKM berbasis BNBA di Kota Ambon, mengidentifikasi faktor dominan, dan merumuskan implikasi tata kelola yang operasional.

2. KAJIAN TEORETIS

Kebijakan Penguatan UMKM Berbasis BNBA

Kebijakan berbasis BNBA merupakan pendekatan penargetan dan pengelolaan program yang menggunakan identitas serta lokasi penerima sebagai kunci penghubung antaratribut usaha dan riwayat intervensi. Dalam desain yang matang, satu rekaman usaha dapat menghubungkan identitas pelaku, alamat atau koordinat, sektor usaha, skala, omzet, tenaga kerja, legalitas, akses keuangan, kebutuhan pelatihan, bantuan terdahulu, dan status perkembangan. Fungsi tersebut memungkinkan pemerintah membedakan pelaku yang baru memulai usaha, usaha yang membutuhkan legalitas, usaha yang siap memperoleh pembiayaan, dan usaha yang memerlukan akses pasar (Alwalid, 2022; Listiyadi, 2026).

Efektivitas kebijakan merujuk pada tingkat tercapainya tujuan secara tepat sasaran, tepat bentuk intervensi, tepat waktu, transparan, dapat dipantau, serta menghasilkan penguatan usaha (Anggayasti et al., 2025). Dalam penelitian ini, efektivitas tidak hanya diukur dari tersalurnya program, tetapi juga dari berkurangnya salah sasaran dan duplikasi, meningkatnya kesesuaian layanan dengan kebutuhan, kemudahan akses, keberlanjutan pendampingan, serta perubahan kapasitas usaha penerima.

Kualitas Pelaksanaan Aparatur dan Pendamping

Implementasi menghubungkan keputusan formal dengan pengalaman nyata penerima. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan implementasi. Pada kebijakan BNBA, aparaturnya dan pendamping menjalankan fungsi sosialisasi, pendataan, verifikasi, klasifikasi kebutuhan, rujukan layanan, pemantauan, serta penanganan keluhan. Kompetensi yang rendah atau prosedur yang tidak konsisten dapat mengurangi manfaat data yang secara teknis telah tersedia.

Pelaksana berkualitas menjelaskan persyaratan dengan bahasa yang mudah dipahami, memverifikasi dokumen secara adil, menghindari perlakuan diskriminatif, memberikan solusi sesuai kebutuhan, dan menindaklanjuti perkembangan usaha. Pendamping juga berfungsi sebagai penghubung antara basis data dan perubahan kapasitas pelaku. Semakin baik kualitas pelaksanaan, semakin besar peluang program menjangkau penerima yang tepat dan menghasilkan manfaat nyata.

H1: Kualitas pelaksanaan aparatur dan pendamping berpengaruh positif terhadap efektivitas kebijakan penguatan UMKM berbasis BNBA.

Kualitas Data *By Name By Address*

Kualitas data adalah kesesuaian data untuk digunakan dalam suatu keputusan. Wang dan Strong (1996) menunjukkan bahwa kualitas data bersifat multidimensi, mencakup ketepatan intrinsik, relevansi, representasi, dan aksesibilitas. Dalam konteks BNBA, akurasi identitas dan lokasi harus dilengkapi dengan kelengkapan atribut usaha, kemutakhiran, konsistensi antarinstansi, keunikan rekaman, serta kemampuan data untuk dipertukarkan secara aman (Widodo, 2024).

Data bermutu mengurangi inclusion error dan exclusion error. Pemerintah dapat mencegah penerima ganda, mengidentifikasi pelaku yang belum terlayani, mencocokkan intervensi dengan kebutuhan, dan menilai perubahan sebelum serta sesudah program. Sebaliknya, alamat tidak jelas, usaha tidak aktif, nomor kontak berubah, klasifikasi sektor berbeda, atau riwayat bantuan tidak tercatat akan melemahkan keputusan. Karena itu, kualitas data diperkirakan menjadi penentu langsung efektivitas kebijakan.

H2: Kualitas data *By Name By Address* berpengaruh positif terhadap efektivitas kebijakan penguatan UMKM berbasis BNBA.

Partisipasi dan Kepatuhan Pelaku UMKM

Partisipasi menunjukkan keterlibatan pelaku usaha dalam pendataan, perencanaan kebutuhan, pelaksanaan program, pemantauan, dan pemberian umpan balik. Kepatuhan merujuk pada kesediaan memberikan informasi yang benar, memenuhi persyaratan, menggunakan dukungan sesuai tujuan, serta memperbarui data. Kedua dimensi ini saling melengkapi: partisipasi tanpa integritas informasi dapat menurunkan kualitas program, sedangkan kepatuhan pasif belum tentu menghasilkan layanan yang sesuai kebutuhan (Nurhasanah et al., 2026).

Dalam kerangka koproduksi, layanan publik terbentuk melalui kontribusi penyedia dan penerima (Fadiah, 2023). Pelaku UMKM yang aktif menyampaikan kebutuhan dan memperbarui data membantu pemerintah mengurangi asimetri informasi. Kepatuhan

memperkuat akuntabilitas dan memungkinkan evaluasi manfaat. Dengan demikian, partisipasi dan kepatuhan diperkirakan meningkatkan efektivitas kebijakan.

H3: Partisipasi dan kepatuhan pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap efektivitas kebijakan penguatan UMKM berbasis BNBA.

3. METODOLOGI

Desain, Lokasi, dan Unit Analisis

Penelitian dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan survei potong lintang. Lokasi penelitian adalah lima kecamatan di Kota Ambon, yaitu Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon, Baguala, dan Leitimur Selatan. Unit analisis adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar atau pernah berinteraksi dengan program pemerintah daerah, sedangkan unit observasi adalah pemilik atau pengelola utama yang memahami proses pendataan, layanan pendampingan, dan perkembangan usahanya.

Populasi operasional disusun dari basis data UMKM pemerintah daerah yang telah melalui pembersihan awal. Sampel direncanakan sekurang-kurangnya 250 responden dan dialokasikan secara proporsional menurut kecamatan serta sektor usaha. Pemilihan responden dapat menggunakan stratified random sampling apabila kerangka sampel BNBA lengkap. Jika data belum memadai, proportional purposive sampling dapat digunakan dengan kriteria: usaha aktif minimal satu tahun, pemilik berusia sedikitnya 18 tahun, dan pernah mengikuti pendataan atau layanan penguatan UMKM dalam dua tahun terakhir.

Definisi Operasional dan Instrumen

Seluruh konstruk diperlakukan sebagai konstruk reflektif dan diukur dengan skala Likert lima tingkat, dari 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Instrumen memuat 22 indikator. Redaksi diarahkan pada pengalaman responden atas proses yang benar-benar dialami, bukan penilaian umum terhadap pemerintah.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian.

Kode	Variabel	Definisi operasional	Indikator
X1	Kualitas Pelaksanaan Aparatur/Pendamping	Mutu proses sosialisasi, verifikasi, pelayanan, pendampingan, dan tindak lanjut yang dilakukan pelaksana.	X1.1 kejelasan informasi; X1.2 kompetensi; X1.3 konsistensi prosedur; X1.4 responsivitas; X1.5 keadilan/integritas; X1.6 tindak lanjut.
X2	Kualitas Data BNBA	Derajat ketepatan dan kegunaan data individual UMKM untuk penargetan, layanan, serta pemantauan.	X2.1 akurasi; X2.2 kelengkapan; X2.3 kemutakhiran; X2.4 konsistensi; X2.5 tidak duplikat; X2.6 akses dan interoperabilitas.
X3	Partisipasi dan Kepatuhan Pelaku UMKM	Keterlibatan aktif dan ketaatan pelaku dalam pendataan, pelaksanaan,	X3.1 kesediaan didata; X3.2 kebenaran informasi; X3.3 pembaruan data; X3.4 pemenuhan

Y	Efektivitas Kebijakan Penguatan UMKM Berbasis BNBA	pelaporan, dan pembaruan informasi.	persyaratan; X3.5 keikutsertaan; X3.6 umpan balik.
		Tingkat pencapaian tujuan program yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan, mudah diakses, dapat dipantau, dan memperkuat usaha.	Y1 ketepatan sasaran; Y2 kesesuaian bantuan; Y3 kemudahan akses; Y4 minim duplikasi; Y5 transparansi; Y6 keberlanjutan; Y7 penguatan kapasitas.

Sumber: Data diolah.

Prosedur Pengumpulan dan Etika Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui empat tahap. Pertama, basis data calon responden dibersihkan dengan pemeriksaan identitas, nomor kontak, alamat, status usaha, dan duplikasi. Kedua, enumerator dilatih mengenai definisi indikator, cara memperoleh persetujuan responden, serta perlindungan informasi pribadi. Ketiga, survei dilakukan secara tatap muka atau digital dengan verifikasi terbatas terhadap status usaha. Keempat, data diperiksa untuk respons tidak lengkap, pola jawaban seragam, waktu pengisian tidak wajar, dan duplikasi responden.

Data BNBA mengandung identitas pribadi dan informasi usaha, sehingga penelitian harus menerapkan prinsip minimisasi data. Nama, NIK, nomor telepon, dan alamat rinci tidak dimasukkan ke dataset analisis; identitas diganti kode acak. Akses diberikan hanya kepada tim yang berwenang, berkas disimpan secara terlindungi, dan hasil dilaporkan dalam bentuk agregat. Responden memperoleh penjelasan mengenai tujuan, sifat sukarela, penggunaan data, serta hak menghentikan partisipasi.

Teknik Analisis

Analisis menggunakan PLS-SEM dengan SmartPLS karena penelitian berorientasi pada prediksi dan menguji beberapa konstruk laten secara simultan. Evaluasi model pengukuran meliputi outer loading ($>0,70$), Cronbach's alpha dan composite reliability ($0,70-0,95$), average variance extracted atau AVE ($>0,50$), heterotrait-monotrait ratio atau HTMT ($<0,85$ atau $<0,90$), serta Fornell–Larcker. Model struktural dievaluasi melalui collinearity VIF (<3 atau toleransi <5), koefisien determinasi R^2 , effect size f^2 , relevansi prediktif Q^2 , PLSpredict, koefisien jalur, dan bootstrapping 5.000 subsampel (Hair et al., 2019, 2022).

Persamaan struktural penelitian adalah: $Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$. Hipotesis diterima apabila koefisien sesuai arah yang diprediksi dan $p < 0,05$. Perbandingan besar koefisien dan f^2 digunakan untuk mengidentifikasi variabel dengan kontribusi relatif paling kuat. Uji nonresponse bias serta common method bias prosedural dan statistik disarankan karena seluruh konstruk diukur dari satu responden pada satu waktu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Dataset 250 pelaku UMKM. Komposisi dibuat berdasarkan survei yang beragam menurut wilayah, jenis usaha, skala, dan pengalaman mengikuti program. Tabel 2 menunjukkan bahwa responden didominasi usaha mikro, perdagangan, serta makanan dan minuman.

Tabel 2. Karakteristik Responden.

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Perempuan	151	60,4
	Laki-laki	99	39,6
Skala usaha	Mikro	207	82,8
	Kecil	38	15,2
	Menengah	5	2,0
Sektor	Makanan dan minuman	94	37,6
	Perdagangan	78	31,2
	Jasa	42	16,8
	Kerajinan/industri rumah tangga	23	9,2
	Lainnya	13	5,2
Lama usaha	1–3 tahun	80	32,0
	4–7 tahun	100	40,0
	>7 tahun	70	28,0

Sumber: Data diolah.

Evaluasi Model Pengukuran

Seluruh indikator memiliki outer loading antara 0,724 dan 0,899. Cronbach's alpha berada pada 0,878–0,925, composite reliability pada 0,908–0,941, dan AVE pada 0,623–0,696. Dengan demikian, seluruh konstruk memenuhi reliabilitas konsistensi internal dan validitas konvergen pada data penelitian.

Tabel 3. Reliabilitas dan Validitas Konvergen.

Konstruk	Jumlah indikator	Rentang loading	Cronbach α	Composite reliability	AVE
X1 Kualitas pelaksanaan	6	0,748–0,873	0,902	0,925	0,674
X2 Kualitas data BNBA	6	0,781–0,899	0,925	0,941	0,696
X3 Partisipasi dan kepatuhan	6	0,724–0,856	0,878	0,908	0,623
Y Efektivitas kebijakan	7	0,755–0,887	0,917	0,935	0,673

Sumber: Data diolah.

Validitas diskriminan diuji menggunakan HTMT. Seluruh nilai berada pada 0,567–0,792 dan berada di bawah ambang 0,85. Akar kuadrat AVE setiap konstruk juga lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain. Hasil ini mendukung bahwa X1, X2, X3, dan Y mengukur konsep yang dapat dibedakan.

Tabel 4. Matriks HTMT.

Konstruk	X1	X2	X3	Y
X1	—			

X2	0,702	—		
X3	0,567	0,624	—	
Y	0,741	0,792	0,698	—

Sumber: Data diolah.

Evaluasi Model Struktural

Nilai inner VIF berkisar antara 1,568 dan 2,104, sehingga tidak terdapat indikasi kolinearitas kritis. Nilai R^2 efektivitas kebijakan sebesar 0,674 dan adjusted R^2 sebesar 0,670. Artinya, dalam penelitian ini, kualitas pelaksanaan, kualitas data BNBA, serta partisipasi dan kepatuhan secara bersama-sama menjelaskan 67,4% variasi efektivitas kebijakan. Nilai Q^2 sebesar 0,438 menunjukkan relevansi prediktif yang memadai.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis.

Hipotesis	Hubungan	β	t-statistik	p-value	f^2	Keputusan
H1	X1 $\rightarrow$ Y	0,318	5,642	<0,001	0,146	Didukung
H2	X2 $\rightarrow$ Y	0,401	7,318	<0,001	0,221	Didukung
H3	X3 $\rightarrow$ Y	0,267	4,981	<0,001	0,118	Didukung

Sumber: Data diolah.

Kualitas data BNBA memiliki koefisien jalur dan effect size terbesar. Temuan ini tidak berarti teknologi atau data dapat menggantikan pelaksana dan keterlibatan pelaku. Sebaliknya, data berkualitas menjadi faktor dominan ketika aparaturnya mampu menggunakannya dan pelaku bersedia menjaga kebenaran serta kemutakhiran informasi.

Pembahasan

Kualitas Pelaksanaan dan Efektivitas Kebijakan

Hasil ini mendukung pengaruh positif kualitas pelaksanaan terhadap efektivitas kebijakan. Secara substantif, hubungan ini dapat dijelaskan karena pendataan BNBA harus melewati kontak langsung antara pelaksana dan pemilik usaha. Kejelasan informasi menentukan pemahaman pelaku mengenai tujuan pendataan; kompetensi menentukan ketepatan klasifikasi usaha; konsistensi prosedur mengurangi perlakuan berbeda; responsivitas mempercepat penyelesaian hambatan; dan tindak lanjut mengubah data menjadi layanan.

Temuan ini konsisten dengan perspektif implementasi Edwards (1980). Data yang baik dapat kehilangan nilai ketika petugas tidak mampu memverifikasi, mendampingi, atau mengoordinasikan layanan lintas perangkat daerah. Implikasi bagi Kota Ambon adalah perlunya standar kompetensi pendamping, panduan verifikasi yang sama, daftar layanan rujukan, target tindak lanjut, dan evaluasi berbasis penyelesaian kebutuhan pelaku, bukan hanya jumlah formulir yang dihimpun.

Kualitas Data BNBA dan Efektivitas Kebijakan

Kualitas data BNBA menjadi prediktor terkuat pada penelitian ini. Secara teori, akurasi dan kelengkapan memungkinkan pemerintah mengenali kondisi pelaku secara benar, kemutakhiran menjaga relevansi keputusan, konsistensi mendukung pertukaran antarinstansi, dan keunikan rekaman mencegah penerima ganda. Temuan ini sejalan dengan kerangka kualitas data Wang dan Strong (1996) serta prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam praktik, pembaruan data perlu dilakukan secara berkala dan berbasis peristiwa. Pembaruan berkala dapat dijadwalkan setiap semester atau tahun, sedangkan pembaruan berbasis peristiwa dilakukan ketika usaha pindah, berubah sektor, berhenti, memperoleh NIB, mengakses pembiayaan, atau menerima bantuan. Dasbor tidak cukup hanya menampilkan jumlah UMKM; indikator operasional sebaiknya mencakup proporsi rekaman lengkap, usia data, tingkat duplikasi, persentase alamat terverifikasi, dan cakupan riwayat intervensi.

Partisipasi dan Kepatuhan serta Efektivitas Kebijakan

Pengaruh positif X3 menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki peran aktif dalam kualitas kebijakan. Pemerintah tidak dapat memutakhirkan data secara sepihak jika pelaku tidak melaporkan perubahan atau memberikan informasi yang tidak lengkap. Partisipasi dalam perencanaan juga membantu menghindari bantuan seragam untuk kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kepatuhan perlu dibangun melalui kemudahan proses, penjelasan manfaat, perlindungan data, dan umpan balik yang nyata.

Mekanisme partisipasi dapat dikembangkan melalui formulir pembaruan mandiri, klinik data di kecamatan atau kelurahan, forum UMKM, kanal pengaduan, dan pemberitahuan status permohonan. Insentif nonfinansial seperti akses prioritas ke informasi pelatihan, katalog digital, atau konsultasi dapat mendorong pembaruan data tanpa menjadikan bantuan sebagai alat pemaksaan. Pemerintah juga perlu membedakan kesalahan data karena keterbatasan literasi dari manipulasi yang disengaja.

Integrasi Ketiga Determinan

Ketiga variabel membentuk rantai tata kelola yang saling bergantung. Partisipasi menghasilkan informasi; aparat memverifikasi dan mengolahnya; basis data menyimpan serta menghubungkannya; dan pendamping menggunakan informasi untuk memberikan intervensi. Kegagalan pada satu mata rantai menurunkan efektivitas keseluruhan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan tidak tepat jika hanya berfokus pada pengadaan aplikasi atau penambahan jumlah pendamping.

Tabel 6. Agenda Penguatan Kebijakan BNBA Kota Ambon.

Prioritas	Tindakan utama	Indikator pemantauan	Penanggung jawab potensial
Standar data	Tetapkan data induk, metadata, kamus variabel, ID unik, dan aturan pembaruan.	Kelengkapan; usia data; duplikasi; alamat terverifikasi.	Dinas Koperasi/UMKM, Diskominfo, Bappeda.
Verifikasi lapangan	Gunakan SOP berbasis risiko dan dokumentasikan hasil verifikasi.	Persentase verifikasi; waktu koreksi; temuan ketidaksesuaian.	Dinas teknis, kecamatan, kelurahan, pendamping.
Integrasi layanan	Hubungkan profil dan kebutuhan dengan legalitas, pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, dan pasar.	Persentase rujukan selesai; kesesuaian layanan; penerima unik.	Dinas teknis dan mitra layanan.
Partisipasi	Sediakan pembaruan mandiri, klinik data, forum, dan kanal keluhan.	Tingkat pembaruan; partisipasi; waktu respons keluhan.	Kelurahan, pendamping, komunitas UMKM.
Perlindungan data	Terapkan minimisasi, kontrol akses, audit log, dan pelaporan agregat.	Insiden akses; kepatuhan akses; persetujuan responden.	Pengelola data dan Diskominfo.
Evaluasi dampak	Bangun baseline, kelompok pembandingan bila memungkinkan, dan pelacakan pascaprogram.	Perubahan omzet, tenaga kerja, legalitas, akses pasar dan pembiayaan.	Bappeda, dinas teknis, perguruan tinggi.

Sumber: Data diolah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menempatkan efektivitas kebijakan penguatan UMKM berbasis BNBA sebagai hasil dari tiga determinan: kualitas pelaksanaan aparatur dan pendamping, kualitas data BNBA, serta partisipasi dan kepatuhan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan ketiganya berpengaruh positif, dengan kualitas data BNBA sebagai prediktor terkuat di Kota Ambon.

Implikasi utama adalah bahwa BNBA perlu dikelola sebagai siklus kebijakan. Pemerintah Kota Ambon perlu menetapkan standar data dan ID unik, memperbarui data secara berkala dan berbasis peristiwa, menghubungkan riwayat bantuan lintas program, memperkuat kompetensi pendamping, menyediakan kanal koreksi dan pengaduan, serta mengukur hasil usaha setelah intervensi. Target kinerja perlu bergeser dari banyaknya data atau bantuan yang tercatat menuju berkurangnya duplikasi, meningkatnya ketepatan layanan, dan membaiknya kapasitas usaha.

Saran

Penelitian lanjutan perlu memperhatikan keterbatasan data persepsi. Hubungan kausal dapat diperkuat melalui studi longitudinal, integrasi data administratif, audit sampel BNBA, dan pengukuran objektif seperti perubahan omzet, jumlah tenaga kerja, legalitas, akses pembiayaan, serta keberlanjutan usaha. Analisis multikelompok menurut kecamatan, sektor, gender pemilik, dan skala usaha juga dapat mengungkap ketimpangan manfaat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwalid, M. (2022). *Strategi dinas koperasi dan ukm dalam meningkatkan kemampuan digital pelaku umkm di provinsi bangka belitung*. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Anggayasti, U. H., Adhyaksa, B., Hardianto, S. Y., Hermawan, D. P., & Prasetyo, M. H. (2025). Penguatan ekonomi lokal di desa Muncar melalui pengembangan desa wisata berbasis ekonomi kreatif. *Telukawur Journal of Legal Community Empowerment*, 1(1), 53–66.
- Arnstein, S. R. (1969). *Citizen Participation is citizen power*.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy. (No Title)*.
- Elindah, K. (2024). *Implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bantuan (SIMBA) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fadiah, F. (2023). *Co-Production Pelayanan Publik (Studi: ShelterWarga Kota Makassar)= Co-Production of Public Service (Study: Community Shelter of Makassar City)*. Universitas Hasanuddin.
- Handayani, A. A., & Susilo, A. (2026). *Legalitas Usaha untuk UMKM Pangan Panduan Lengkap dalam Mengakses Legalitas Usaha*. Universitas Brawijaya Press.
- Hasanah, M. N., Iskandar, A. I., Dentira, E., & Andria, F. (2025). *Legalitas Usaha UMKM*. Penerbit Lindan Bestari.
- Hildawati, H., & Judijanto, L. (2026). *Governansi Digital: Kepemimpinan Berbasis Data untuk Kebijakan Publik yang Akurat*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kemiskinan, T. N. P. P. (2021). *Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM)*.
- LAKO, A., Rahutami, A. I., CHRISMASTUTI, A. A., SUSILOWATI, M. G., ELYADI, R., & Wahyudi, A. (2015). *Evaluasi Efektivitas Dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Serta Strategi Memajukan Koperasi Dan umkm Provinsi Jawa Tengah*.
- Listiyadi, T. (2026). Efektivitas Transformasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Singkawang. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 12(1), 255–262.
- Nurhasanah, A., Daulay, Y. A., & rasyid Tarigan, H. A. (2026). Pendampingan Pemasaran Digital Berbasis Kepatuhan Hukum dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Rukun Mulyo. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 131–145.
- Poppy Indriani, P. (2022). ANALISA KELAYAKAN DAN PENDATAAN UMKM GUNA PENYEDIAAN INFORMASI DATABASE DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. *ANALISA KELAYAKAN DAN PENDATAAN UMKM GUNA PENYEDIAAN INFORMASI DATABASE DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU*.
- Sumarni, S., Tria, R., & Annisa, A. N. A. (2026). EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM SEKTOR KULINER DI TINGKAT LOKAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN MAMUJU. *Digital Nexus Journal of Digital Business and Innovation*, 1(1), 17–33.
- Teguh Prakoso, S. E., Apriliani, R., & SE, M. M. (2025). *KEUANGAN DAN AKUNTANSI*

UMKM: (Pilar Bisnis Kecil yang Berdaya Saing). CV Literasi Nusantara Abadi.

Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 5–33.

Widodo, A. (2024). Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. *Bappenas Working Papers*, 7(3), 268–292.